



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Pemda, Jalan Jend. Sudirman, Telp/Fax. (0266) 6446011,
Website: <https://inspektorat.sukabumikab.go.id>, email: inspektoratkabsi@yahoo.com
PALABUHANRATU - SUKABUMI, 43364

Palabuhanratu, 17 Juli 2024 M
11 Muharram 1446 H

Nomor : 700.1.2.1 / 1538 / Sekret / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 dokumen
Perihal : Surat Pengantar Renja
Inspektorat Tahun 2025.

Kepada;
Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

di -

Palabuhanratu

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) tentang Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut terlampir berkas Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR
KABUPATEN SUKABUMI

H. KOMARUDIN, S.E., M.Si., CGCAE., CGRE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196801031996031004

Diterima : Tanggal 17 Juli 2024
Penerima : Taupien K.P.



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
INSPEKTORAT**

*Komplek Perkantoran Pemda Jl. Jend. Sudirman - Palabuhanratu
Telp/Fax. 0266-6446011 Palabuhanratu 43364*

2024



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-.....



- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan.....



- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909)
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah.....



- 4 -

Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114);
25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

5. Sekretaris



- 5 -

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik yang

berupa.....



- 6 -

berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program / kegiatan, serta kelompok sasaran dan penganggarannya.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tujuan:
 - a. sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2025; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV SISTIMATIKA

Pasal 4

- I. PENDAHULUAN
- II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- V. PENUTUP

BAB V.....



- 7 -

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

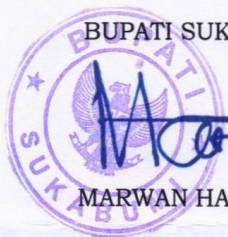
- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah per Triwulan setiap tahunnya kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal, 05 Agustus 2024


BUPATI SUKABUMI

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 05 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 20



- 8 -

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TANGGAL : 05 AGUSTUS 2024

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2025

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025**

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;
3. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025;
4. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025;
5. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025;
6. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;
7. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025;
8. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025;
9. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025;
10. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025;
11. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025;
12. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025;
13. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025;
14. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
15. Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
16. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2025;
17. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025;
18. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2025;
19. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2025;
20. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
21. Rencana Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2025;
22. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025;
23. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2025;
24. Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025;
25. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025;
26. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025;
27. Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025;
28. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025;



29. Rencana Kerja Dinas Peternakan Tahun 2025;
30. Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2025;
31. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2025;
32. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2025;
33. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;
34. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025;
35. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;
36. Rencana Kerja Kecamatan Sukabumi Tahun 2025;
37. Rencana Kerja Kecamatan Jampangtengah Tahun 2025;
38. Rencana Kerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2025;
39. Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2025;
40. Rencana Kerja Kecamatan Cisaat Tahun 2025;
41. Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Tahun 2025;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kadudampit Tahun 2025
43. Rencana Kerja Kecamatan Sukalarang Tahun 2025
44. Rencana Kerja Kecamatan Gunungguruh Tahun 2025;
45. Rencana Kerja Kecamatan Kabandungan Tahun 2025;
46. Rencana Kerja Kecamatan Surade Tahun 2025;
47. Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2025;
48. Rencana Kerja Kecamatan Ciracap Tahun 2025;
49. Rencana Kerja Kecamatan Kebonpedes Tahun 2025;
50. Rencana Kerja Kecamatan Kalibunder Tahun 2025;
51. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2025;
52. Rencana Kerja Kecamatan Purabaya Tahun 2025;
53. Rencana Kerja Kecamatan Cireunghas Tahun 2025;
54. Rencana Kerja Kecamatan Cibitung Tahun 2025;
55. Rencana Kerja Kecamatan Gegerbitung Tahun 2025;
56. Rencana Kerja Kecamatan Cidahu Tahun 2025;
57. Rencana Kerja Kecamatan Cicurug Tahun 2025;
58. Rencana Kerja Kecamatan Sagaranten Tahun 2025;
59. Rencana Kerja Kecamatan Nyalindung Tahun 2025;
60. Rencana Kerja Kecamatan Curugkembar Tahun 2025;
61. Rencana Kerja Kecamatan Tegalbuled Tahun 2025;
62. Rencana Kerja Kecamatan Cidadap Tahun 2025;
63. Rencana Kerja Kecamatan Cidolog Tahun 2025;
64. Rencana Kerja Kecamatan Ciambar Tahun 2025;
65. Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Tahun 2025;
66. Rencana Kerja Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2025;
67. Rencana Kerja Kecamatan Cikakak Tahun 2025;
68. Rencana Kerja Kecamatan Simpenan Tahun 2025;
69. Rencana Kerja Kecamatan Cisolok Tahun 2025;
70. Rencana Kerja Kecamatan Bantargadung Tahun 2025;
71. Rencana Kerja Kecamatan Warungkiara Tahun 2025;
72. Rencana Kerja Kecamatan Cikidang Tahun 2025;
73. Rencana Kerja Kecamatan Cikembar Tahun 2025;
74. Rencana Kerja Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2025;



- 10 -

75. Rencana Kerja Kecamatan Lengkong Tahun 2025;
76. Rencana Kerja Kecamatan Ciemas Tahun 2025;
77. Rencana Kerja Kecamatan Cibadak Tahun 2025;
78. Rencana Kerja Kecamatan Cicantayan Tahun 2025;
79. Rencana Kerja Kecamatan Waluran Tahun 2025;
80. Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2025;
81. Rencana Kerja Kecamatan Parakansalak Tahun 2025;
82. Rencana Kerja Kecamatan Jampangkulon Tahun 2025.


BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Inspektorat Kabupaten Sukabumi mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan.

Palabuhanratu, 5 Agustus 2024

INSPEKTUR

KABUPATEN SUKABUMI



H. Komarudin, S.E., M.Si., CGCAE., CGRE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196801031996031004



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat ...	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat	54
3.3 Program dan Kegiatan	55
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	
4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten	72
4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	73
 BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting	81
5.2 Kaidah Pelaksanaan	81
5.3 Rencana Tindak Lanjut	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renja Inspektorat Tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan dari penjabaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman/acuan bagi Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Inspektorat Kabupaten Sukabumi menyusun dokumen Rancangan Akhir Renja untuk mewujudkan tema/fokus pembangunan pada “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Inklusif berbasis Sektor Unggulan Daerah yang Berkelanjutan”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008



- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan



- Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



- (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026;
 39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomo 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 43. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
 44. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
 45. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 adalah :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program / kegiatan, serta kelompok sasaran dan penganggarnya.
- b. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
- e. Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan lembaga lainnya.
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- g. Untuk memudahkan penilaian dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja Inspektorat dan Pemerintahan Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

- 4.1 Prioritas Inspektorat Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
- 4.2 Rencana Kerja Dan Inspektorat

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2024 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2024 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2024 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2023 dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6						Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100%	100	300	75
6	1	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	107	21	21	21	100%	21	63	15,75
6	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	2	2	2	100%	2	6	1,5
6	1	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	0,8



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	0,8
6	1	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	0,8
6	1	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	0,8
6	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	3	3	3	100%	3	9	2,3
6	1	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	9,0



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Dokumen	5075	938	909	909	100%	854	2701	675,25
6	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	4900	924	896	896	100%	840	2660	665,0
6	1	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	20	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	20	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5	1	0	0	0%	1	2	0,5



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	1	2	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	5	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	9,0
6	1	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	0,8
6	1	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	130	13	13	13	100%	17	43	10,75
6	1	1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	10	1	1	1	100%	1	3	0,8



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	12	12	12	100%	4	28	7,0
6	1	1	2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	0	0	0	0%	12	12	3,0
6	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1434	104	112	112	100%	354	570	142,5
6	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	9	0	0	0	0%	2	2	0,5
6	1	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	60	12	12	12	100%	12	36	9,0
6	1	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	450	8	18	18	100%	60	86	21,5
6	1	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	0	0	0	0%	200	200	50,0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	615	84	82	82	100%	80	246	61,5
6	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	270	55	37	37	100%	54	146	36,5
6	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	10	2	2	2	100%	1	5	1,3
6	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	10	2	2	2	100%	4	8	2,0
6	1	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	10	2	2	2	100%	1	5	1,3
6	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	20	12	6	6	100%	12	30	7,5
6	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	20	12	12	12	100%	12	36	9,0
6	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	5	12	0	0	0%	0	12	3,0



Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	1	2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	0	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	1	1	1	100%	5	7	1,8	
6	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Perjalanan dinas dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	9,0	
6	1	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	0	0	0	0%	6	6	1,5	
6	1	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0%	1	1	0,3	
6	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli	Unit	160	34	29	29	100%	49	112	28	
6	1	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8	0	0	0	0%	2	2	0,5	
6	1	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	19	0	0	0	0%	6	6	1,5	



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	1	0	0	0%	1	2	0,5
6	1	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	83	33	29	29	100%	40	102	25,5
6	1	1	2	7	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	22	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang kebutuhan perkantoran yang dipenuhi	Laporan	202	37	37	37	100%	37	111	27,75
6	1	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	9,0
6	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	9,0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
						Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
6	1	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	22	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60	13	13	13	100%	13	39	9,8
6	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	273	119	105	105	100%	123	347	86,75
6	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	52	7	7	7	100%	8	22	5,5
6	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	69	6	6	6	100%	12	24	6,0
6	1	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	Unit	30	0	0	0	0%	30	30	7,5



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	48	104	91	91	100%	70	265	66,3
6	1	1	2	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	40	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	1	2	9	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit	5	1	1	1	100%	2	4	1,0
6	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	5	0	0	0	0%	1	1	0,3
6	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	12	1	0	0	0%	0	1	0,3
6	1	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	12	0	0	0	0%	0	0	0,0
6	1	2				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Poin	3,50	3,29	25	25	100%	25	714,29	27,65%
6	1	2	2	1		Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem	%	59,32	46,61	46,61	46,61	100%	46,61	139,83	34,9575



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
							Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)									
6	1	2	2	1	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	245	10	6	6	100%	15	31	7,8
6	1	2	2	1	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1890	356	338	338	100%	370	1064	266,0
6	1	2	2	1	3		Reviu Laporan Kinerja	Laporan	338	37	84	84	100%	85	206	51,5
6	1	2	2	1	4		Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2335	370	371	371	100%	380	1121	280,3
6	1	2	2	1	5		Pengawasan Desa	Laporan	270	24	24	24	100%	70	118	29,5
6	1	2	2	1	6		Kerjasama Pengawasan Internal	Kesepakatan	5	1	1	1	100%	2	4	1,0
6	1	2	2	1	7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	35	6	6	6	100%	8	20	5,0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	2	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	41	81	125	125	100%	80	286	71,5
6	1	2	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan	369	20	30	30	100%	30	80	20,0
6	1	2	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	400	61	95	95	100%	50	206	51,5
6	1	3				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level	3	3	25	25	100%	25	2400	15,11%



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	3	3	1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	%	51	5	4	4	100%	4	13	3,25
6	1	3	3	1	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	14	5	4	4	100%	2	11	2,8
6	1	3	3	1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	14	0	0	0	0%	2	2	0,5
6	1	3	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	%	100%	34%	100%	100%	100%	100%	234%	0,584783
6	1	3	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	68	15	5	5	100%	20	40	10,0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
6	1	3	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	7	12	1	1	100%	10	23	5,8
6	1	3	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	30	6	6	6	100%	8	20	5,0
6	1	3	3	2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	10	6	4	4	100%	10	20	5,0

Pada tahun 2023 total anggaran Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 18.367.397.616,00 dengan pelaksanaan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) Subkegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 18.074.123.295,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 98,40%. Secara spesifik realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan berdasarkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, terdapat 1 (satu) Program penunjang dan 2 (dua) Program utama dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui 8 (delapan) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 15.275.496.116,00 dan realisasi anggaran Rp 15.043.114.295,00 atau 98,48%, meliputi :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 7 (tujuh) subkegiatan dengan jumlah anggaran Rp54.990.000,00 dan realisasi anggaran Rp53.902.000,00 atau 98,02%, meliputi:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau 100 %. Outputnya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) Dokumen.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp2.702.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.590.000,00 atau 95,85%. Outputnya adalah Jumlah Dokumen

RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 (satu) Dokumen.

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp3.048.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.941.000,00 atau 96,49%. Outputnya adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 (satu) Dokumen.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau 100%. Outputnya adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 (satu) Dokumen.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau 100%. Outputnya adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 (satu) Dokumen.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp10.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.948.000,00 atau 92,89%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 3 (tiga) laporan.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp28.530.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.423.000,- atau 99,62%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 4 (empat) laporan.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah

anggaran Rp11.957.746.636,00 dan realisasi anggaran Rp11.792.226.720,00 atau 98,62%, meliputi:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp11.931.126.636,00 dan realisasi sebesar Rp11.792.226.720,00 atau 98,61%. Outputnya adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 64 (enam puluh empat) orang.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp23.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.306.000,00 atau 99,43%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD sebanyak 12 (dua belas) laporan.
 - 3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran sebesar Rp3.180.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.179.000,00 atau 99,97%. Outputnya adalah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 (satu) Dokumen.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp26.620.000,- dan realisasi anggaran Rp26.491.000,00 atau 99,52%, meliputi:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran sebesar Rp3.180.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.080.000,00 atau 96,86%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 2 (dua) laporan.
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp23.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.411.000,00 atau 99,88 %. Outputnya adalah Jumlah

Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 4 (empat) laporan.

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen kepegawaian untuk menunjang ASN yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp399.659.000,- dan realisasi anggaran Rp393.121.731,00 atau 98,36%, meliputi:
- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp22.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp22.333.000,00 atau 97,95%. Outputnya adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 (dua belas) dokumen.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran sebesar Rp241.210.000,00 dan realisasi sebesar Rp237.533.331,00 atau 98,48%. Outputnya adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 7 (tujuh) orang.
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp135.649.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.255.400,00 atau 98,24%. Outputnya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 7 (tujuh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp789.760.780,00 dan realisasi anggaran Rp749.683.169,00 atau 94,93%, meliputi:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp30.668.080,00 dan realisasi sebesar Rp30.601.169,00 atau 99,78%. Outputnya adalah Jumlah

- Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 2 (dua) paket.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp97.323.200,00 dan realisasi sebesar Rp92.481.300,00 atau 95,02% %. Outputnya adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 2 (dua) paket.
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp42.775.400,00 dan realisasi sebesar Rp38.533.800,00 atau 90,08%. Outputnya adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 2 (dua) paket.
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp173.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp173.029.000,00 atau 99,61%. Outputnya adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 2 (dua) paket.
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp169.498.100,00 dan realisasi sebesar Rp168.796.420,00 atau 99,59%. Outputnya adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 (dua) paket.
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp47.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.600.000,00 atau 99,15%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 2 (dua) laporan.
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp228.796.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.641.549,00 atau 87,26%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) laporan.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli yang dipenuhi yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 1 (satu) sub kegiatan

dengan jumlah anggaran Rp334.448.900,00 dan realisasi anggaran Rp333.710.000,00 atau 99,78%, meliputi:

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp334.448.900,00 dan realisasi sebesar Rp333.710.000,00 atau 99,78%. Outputnya adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah laporan jasa penunjang kebutuhan perkantoran yang dipenuhi yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp765.364.800,00 dan realisasi anggaran Rp758.344.653,00 atau 99,08%, meliputi:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp69.060.000,- atau 99,78%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 (dua belas) laporan.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp151.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp145.425.253,00 atau 95,99%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 (dua belas) laporan.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp543.864.800,00 dan realisasi sebesar Rp543.859.400,- atau 100%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 (dua belas) laporan.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp946.906.000,00 dan realisasi anggaran Rp935.635.022,00 atau 98,81%, meliputi:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp471.620.000,00 dan realisasi sebesar Rp464.092.572,00 atau 98,40%. Outputnya adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 7 (tujuh) unit.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp286.536.000,00 dan realisasi sebesar Rp284.536.000,00 atau 99,30%. Outputnya adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 7 (tujuh) unit.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp88.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp88.550.000,00 atau 99,77%. Outputnya adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 105 (seratus lima) unit.
- 4) Pemeliharaan Aset TAK Berwujud, dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.457.000,- atau 98,46%. Outputnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 (satu) unit.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini merupakan salah satu program utama yang mendukung capaian indikator kerja utama yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Indikator kinerja program ini adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu dengan target 100 % yang terealisasi sebesar 106,13 %.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp2.750.616.000,00 dan realisasi anggaran Rp2.705.259.500,00 atau 98,35%, meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, indikator kinerja kegiatan ini adalah Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 7 (tujuh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp1.292.514.500,00 dan realisasi anggaran Rp1.260.909.000,00 atau 97,55%, meliputi:

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp333.691.000,00 dan realisasi sebesar Rp329.716.500,00 atau 98,81%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 10 (sepuluh) laporan.
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp234.716.500,00 dan realisasi sebesar Rp230.886.000,00 atau 98,37%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) laporan.
- 3) Reviu Laporan Kinerja dengan anggaran sebesar Rp99.125.500,00 dan realisasi sebesar Rp97.429.000,00 atau 98,29%. Outputnya adalah Jumlah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) laporan.
- 4) Reviu Laporan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp240.947.000,00 dan realisasi sebesar Rp240.283.000,00 atau 99,72%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) laporan.
- 5) Pengawasan Desa dengan anggaran sebesar Rp147.766.000,00 dan realisasi sebesar Rp146.565.500,- atau 99,19%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa sebanyak 24 (dua puluh empat) laporan.
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal dengan anggaran sebesar Rp55.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp55.449.000,00 atau 99,59%. Outputnya adalah Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk sebanyak 1 (satu) laporan.
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan anggaran sebesar Rp180.593.500,00 dan realisasi sebesar Rp160.580.000,00 atau 88,92%. Outputnya adalah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebanyak 6 (enam) laporan.

- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, indikator kinerja kegiatan ini adalah Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp1.458.101.500,00 dan realisasi anggaran Rp1.444.350.500,00 atau 99,06%, meliputi:
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran sebesar Rp545.925.000,00 dan realisasi sebesar Rp532.442.000,00 atau 97,53 %. Outputnya adalah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani sebanyak 20 (dua puluh) laporan.
 - 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp912.176.500,00 dan realisasi sebesar Rp911.908.500,- atau 99,97%. Outputnya adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 61 (enam puluh satu) laporan.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini merupakan salah satu program utama yang mendukung capaian indikator kerja utama yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Indikator kinerja program ini adalah Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu dengan target 100 % yang terealisasi sebesar 66,67 %.

Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp341.285.500,00 dan realisasi anggaran Rp325.749.500,00 atau 95,45%, meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, indikator kinerja kegiatan ini adalah Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas APIP yang terlaksana yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 1

(satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp207.690.000,00 dan realisasi anggaran Rp202.641.000,00 atau 97,57%, meliputi:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp207.690.000,00 dan realisasi sebesar Rp202.641.000,00 atau 97,57%. Outputnya adalah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun sebanyak 2 (dua) rekomendasi.
- b. Pendampingan dan Asistensi, indikator kinerja kegiatan ini adalah Dukungan pencapaian Level Kapabilitas APIP yaitu dengan target 100% yang terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan dilakukan melalui 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp133.595.500,00 dan realisasi anggaran Rp123.108.500,00 atau 92,15%, meliputi:
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp11.138.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.657.500,00 atau 95,69%. Outputnya adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 5 (lima) perangkat daerah.
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp14.770.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.738.000,00 atau 93,01%. Outputnya Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sebanyak 6 (enam) perangkat daerah.
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan anggaran sebesar Rp92.917.500,00 dan realisasi sebesar Rp84.975.000,00 atau 91,45%. Outputnya adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebanyak 6 (enam) kegiatan.
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan anggaran sebesar Rp14.770.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.738.000,00 atau 93,01%. Outputnya adalah Jumlah Perangkat



Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas sebanyak 4 (empat) perangkat daerah.

Adapun rekapitulasi realisasi kinerja dan anggaran dari capaian indikator sasaran, program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :



Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Anggaran Inspektorat Kabupaten Sukabumi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan			
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,2	3,2	100	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.750.616.000	2.705.259.500	98,35	1 Audit Kinerja Perangkat Daerah = 3 laporan 2 Audit Ketaatan Perangkat Daerah = 6 laporan 3 Audit Ketaatan Pada Pemerintahan Desa = 24 laporan 4 Audit Dengan Tujuan Tertentu = 60 laporan 5 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah = 30 laporan 6 Reviu RKPD Tahun 2024 dan Reviu Perubahan RKPD Tahun 2023 = 2 laporan 7 Reviu KUA, PPAS Tahun 2024 dan Reviu Perubahan KUA, Perubahan PPAS Tahun 2023 = 2 laporan 8 Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 = 82 laporan 9 Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 = 82 laporan 10 Reviu RKA Tahun 2024 = 82 laporan 11 Reviu Perubahan RKA Tahun 2023 = 82 laporan 12 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 = 1 laporan 13 Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 = 1 laporan 14 Reviu Penyerapan Anggaran, Penyerapan PBJ, dan Kas Opname = 328 laporan



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan			
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
										15 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 = 1 laporan 16 Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) = 42 laporan 17 Reviu Dengan Tujuan Tertentu = 35 laporan 18 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) = 3 laporan 19 Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 = 82 laporan 20 Monev TLHP Inspektorat Kab Sukabumi = 4 dokumen 21 Monev TLHP BPK = 1 dokumen 22 Monev Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jabar = 1 dokumen 23 Pendampingan BPKP = 1 laporan
		2. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3	3	100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	341.285.500	325.749.500	95,45	1 Penunjang Kapabilitas APIP = 1 Laporan 2 Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah = 1 Laporan 3 Penyusunan PKPT 2024 = 1 Laporan 4 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah = 5 PD. 5 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) = 6 PD. 6 Verifikasi Laporan RAD PPK = 2 Laporan. 7 Monev Pencegahan Korupsi = 1 Laporan. 8 Monitoring/Evaluasi/Verifikasi LHKPN dan LHKASN = 3 Laporan. 9 Evaluasi Penilaian Internal Zona Integritas = 4 PD

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan capaian 100% dan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan capaian 100%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah melalui 2 (dua) program dengan 4 Kegiatan dan 14 Subkegiatan sebesar anggaran Rp3.091.901.500,00 dan terealisasi sebesar Rp3.031.009.000,00 atau 98,03%, anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat melaksanakan satu urusan yaitu urusan penunjang pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kabupaten Sukabumi tidak memiliki aturan mengenai SPM. Inspektorat Kabupaten Sukabumi melaksanakan sistem pengawasan intern pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi serta seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sukabumi. Ruang lingkup PKPT terdiri pelaksanaan tugas audit, reviu, pemantauan, pembinaan, fasilitasi, asistensi dan konsultasi, evaluasi, audit kinerja, Audit Ketaatan dan audit investigatif. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Sukabumi juga menetapkan kegiatan Non PKPT untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemeritahan, kegiatan Non PKPT antara lain terdiri dari monitoring, evaluasi dan asistensi/pendampingan pelaksanaan urusan pemerintah dan kepatuhan perundang-undangan serta pengawasan secara komprehensif.

Adapun indikator kinerja utama yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sebagai upaya kontribusi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD serta pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3 :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Sukabumi

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n +1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n +1)	
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	3,00	3,10	3,20	3,30	3,00	3,29	3,30	3,30	Terpenuhi
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	-	-	2	3	3	3	2	2	3	3	Terpenuhi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukabumi, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Sukabumi.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
4. Pendampingan dan Asistensi;

Secara lengkap gambaran Identifikasi Permasalahan dapat dijelaskan pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah perlu ditingkatkan	a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra b. Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan c. Penggunaan Sistem Informasi belum optimal digunakan dalam kegiatan pengawasan	• Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil 3E • Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan masyarakat • Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (<i>Advisory Services</i>) belum optimal • Masih kurangnya APIP yang memiliki sertifikasi keahlian pengawasan khusus • Sistem informasi yang mendukung pengawasan belum terintegrasi, SDM perlu meningkatkan kompetensi penggunaan TI
2	Tingkat kedewasaan (maturitas) pengendalian internal di lingkungan Pemda Sukabumi perlu ditingkatkan	a. Belum optimalnya pengelolaan risiko di lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi b. Masih kurangnya penerapan nilai integritas bagi ASN Pemda Sukabumi	• Register risiko perlu disusun secara sistematis dan komprehensif • Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi yang sesuai dengan Amanat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Secara lengkap dapat dilihat lampiran Tabel 2.5.



Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Sukabumi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
	INSPEKTORAT DAERAH				21.008.411.147	INSPEKTORAT DAERAH				21.008.411.147	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	15.144.301.147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	15.144.301.147	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	25 Dokumen	106.450.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	25 Dokumen	106.450.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.950.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.950.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.500.000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	21.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	21.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	24.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	24.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	8 Dokumen	8.181.961.147	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	8 Dokumen	8.181.961.147	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukabumi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80Orang/bulan	8.118.961.147	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukabumi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80Orang/bulan	8.118.961.147	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	7.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	7.000.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	7.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	7.000.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	7.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.000.000	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	7.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	7.000.000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	21.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	21.000.000	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Dokumen	42.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Dokumen	42.000.000	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.000.000	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	21.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	21.000.000	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 Dokumen	1.328.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 Dokumen	1.328.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	198.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	198.000.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	28.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	28.000.000	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sukabumi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	960.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sukabumi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	960.000.000	
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	42.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	42.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Dokumen	864.150.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Dokumen	864.150.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	118.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	118.500.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	41.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	41.200.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	152.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	152.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	157.050.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	157.050.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000	
7	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4.900.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4.900.000	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	60.000.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	280.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	280.000.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3.500.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.500.000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	40 Unit	705.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	40 Unit	705.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	
3	Pengadaan Mebel	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	75.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sukabumi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	75.000.000	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	200.000.000	
5	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sukabumi	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sukabumi	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	40 Laporan	909.740.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	40 Laporan	909.740.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	70.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	231.040.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	231.040.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.500.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	605.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	605.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	300 Unit	3.007.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	300 Unit	3.007.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	560.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	560.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	175.000.000	
3	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sukabumi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sukabumi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	35.000.000	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	110.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	110.000.000	
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	25.000.000	
6	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sukabumi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	22.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sukabumi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	22.000.000	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000.000	
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4 Poin	4.605.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4 Poin	4.605.500.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)m Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	59 %	2.389.500.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)m Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	59 %	2.389.500.000	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	468.600.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	468.600.000	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	338 Laporan	340.200.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	338 Laporan	340.200.000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	214.300.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	214.300.000	
4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	413 Laporan	516.900.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	413 Laporan	516.900.000	
5	Pengawasan Desa	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60 Laporan	432.800.000	Pengawasan Desa	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60 Laporan	432.800.000	
6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Sukabumi	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	159.000.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Sukabumi	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	159.000.000	
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	257.700.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Sukabumi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	257.700.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	59 %	2.216.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	59 %	2.216.000.000	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	50 Laporan	1.028.250.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	50 Laporan	1.028.250.000	
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	150 Laporan	1.187.750.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sukabumi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	150 Laporan	1.187.750.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3 Level	1.258.610.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3 Level	1.258.610.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	49 %	519.360.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	49 %	519.360.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Sukabumi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	375.360.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Sukabumi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	375.360.000	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Sukabumi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	144.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Sukabumi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	144.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendampingan dan Asistensi		Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	49 %	739.250.000	Pendampingan dan Asistensi		Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	49 %	739.250.000	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20 perangkat daerah	202.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20 perangkat daerah	202.000.000	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	151.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	151.000.000	
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sukabumi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	246.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sukabumi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	246.000.000	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	140.250.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sukabumi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	140.250.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Inspektorat hanya lingkup pembinaan dan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk di diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus. Keterkaitan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2025**

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Dikarenakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk tahun 2025 belum mengeluarkan kebijakan pengawasan sehingga fokus mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, adapun fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan diantaranya :

A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, subkegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

1. pengendalian inflasi daerah;
2. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
3. tingkat pengangguran terbuka;
4. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
5. penanganan *stunting*.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

1. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau

2. pemeriksaan kinerja.
- B. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu :
 1. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.
 2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Reviu Laporan Keuangan.
 4. Kegiatan Pengawasan Lainnya.
- C. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas, yaitu :
 1. Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN.
 2. Pengendalian gratifikasi.
 3. Pelaksanaan survei penilaian integritas.
 4. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
 5. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.
 6. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.
 7. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.
 8. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
 9. Pemeriksaan investigatif.
 10. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
 11. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
- D. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 1. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.
 2. Maturitas system pengendalian internal pemerintah.
 3. Penerapan manajemen risiko.
 4. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Dari uraian pokok-pokok kebijakan pengawasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten, bahwa penajaman pengawasan dititikberatkan pada menciptakan *good governance, clean government* dan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kabupaten, hal ini sejalan dengan salah satu misi ke 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel**, dengan sasaran ” *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel*” yang diimplentasikan melalui 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi tersebut, Inspektorat Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki peranan dalam menunjang untuk mewujudkan visi tersebut yaitu terdapat pada misi ke 4 (empat) yaitu “**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel**”.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

A. Tujuan

Tujuan atas misi ke 4 (empat) adalah *Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani*.

B. Sasaran

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka ditentukan sasaran adalah *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*.

Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	66,00 Poin	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6,50 poin

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, dimana Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) Program yang terdiri dari 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program penunjang, selanjutnya program tersebut diimplementasikan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan utama dan 8 (delapan) kegiatan penunjang.

Program dan kegiatan pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Sukabumi merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan utama diantaranya :

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sedangkan program dan kegiatan penunjang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD



- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :



- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - f. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - f. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penjabaran / uraian keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025 adalah sebagaimana digambarkan dalam matrik tabel 3.2.



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
												Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
6	1				Inspektorat Daerah				21.008.411.147				30.805.000.000
6	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			15.144.301.147				23.655.000.000
6	1	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		25 Dokumen	106.450.000			26 Dokumen	170.000.000
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi	2 Dokumen	18.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	30.000.000
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
												Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukabumi	3 Laporan	21.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	35.000.000
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi	12 Laporan	24.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16 Laporan	45.000.000
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		8 Dokumen	8.181.961.147			8 Dokumen	13.615.000.000
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukabumi	80 Orang/bulan	8.118.961.147	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80 Orang/bulan	13.500.000.000
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sukabumi	2 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
												Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sukabumi	4 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	15.000.000
6	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sukabumi	3 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	15.000.000
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sukabumi	1 Laporan	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	15.000.000
6	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sukabumi	2 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Sukabumi	12 Laporan	21.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	25.000.000
6	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
													Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan adminstrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		14 Dokumen	242.000.000			14 Dokumen	60.000.000
6	1	1	2.03	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	14.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000
6	1	1	2.03	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi	12 Laporan	21.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	30.000.000
6	1	1	2.03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi	4 Laporan	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	15.000.000
6	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian untuk menunjang ASN		30 Dokumen	1.328.000.000			30 Dokumen	1.575.000.000
6	1	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sukabumi	1 Paket	198.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	200.000.000
6	1	1	2.05	3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi	12 Dokumen	28.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	35.000.000
6	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sukabumi	50 Orang	960.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	1.100.000.000



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
												Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	2.05	1	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi	50 Orang	42.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Orang	60.000.000
6	1	1	2.05	1	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi	90 Orang	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	90 Orang	180.000.000
6	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Pelayanan yang Perkantoran yang dipenuhi		30 Dokumen	864.150.000		30 Dokumen	1.055.000.000
6	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Paket	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	50.000.000
6	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	2 Paket	118.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Paket	150.000.000
6	1	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Paket	41.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	45.000.000
6	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	4 Paket	152.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Paket	200.000.000
6	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sukabumi	4 Paket	157.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Paket	200.000.000
6	1	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	3.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	8.000.000



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
												Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Paket	4.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	7.000.000
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sukabumi	2 Laporan	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	80.000.000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukabumi	12 Laporan	280.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	300.000.000
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sukabumi	4 Dokumen	3.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	8.000.000
6	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	3.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	7.000.000
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli		40 Unit	705.000.000			40 Unit	1.020.000.000
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Unit	350.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	400.000.000
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Unit	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	150.000.000
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sukabumi	20 Unit	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	90.000.000
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sukabumi	30 Unit	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	300.000.000



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tahun 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Unit	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	80.000.000
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang kebutuhan perkantoran yang dipenuhi		40 Laporan	909.740.000			40 Laporan	1.140.000.000
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sukabumi	12 Laporan	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	90.000.000
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sukabumi	12 Laporan	231.040.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	300.000.000
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	12 Laporan	3.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	50.000.000
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	12 Laporan	605.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	700.000.000
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		300 Unit	3.007.000.000			300 Unit	5.020.000.000
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sukabumi	7 Unit	560.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Unit	500.000.000
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sukabumi	8 Unit	175.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Unit	350.000.000



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
													Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Operasional Lapangan								
6	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Mebeulair	Kab. Sukabumi	30 Unit	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	150.000.000	
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sukabumi	70 Unit	110.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70 Unit	150.000.000	
6	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sukabumi	2 Unit	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70 Unit	70.000.000	
6	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Sukabumi	1 Unit	22.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	100.000.000	
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Sukabumi	1 Unit	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	3.500.000.000	
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sukabumi	1 Unit	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	100.000.000	
6	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sukabumi	1 Unit	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	100.000.000	
6	1	2			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,4 Poin	4.605.500.000			3,4 Poin	5.500.000.000	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
													Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	2	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		59%	2.389.500.000			59%	2.800.000.000
6	1	2	2.01	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sukabumi	10 Laporan	468.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Laporan	500.000.000
6	1	2	2.01	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sukabumi	338 Laporan	340.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		398 Laporan	400.000.000
6	1	2	2.01	3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sukabumi	84 Laporan	214.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		137 Laporan	350.000.000
6	1	2	2.01	4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sukabumi	413 Laporan	516.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		439 Laporan	550.000.000
6	1	2	2.01	5		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Sukabumi	60 Laporan	432.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		62 Laporan	450.000.000
6	1	2	2.01	6		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang	Kab. Sukabumi	2 Kesepakatan	159.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Kesepakatan	200.000.000
6	1	2	2.01	7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Sukabumi	6 Dokumen	257.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Dokumen	350.000.000
6	1	2	2.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		59%	2.216.000.000			59%	2.700.000.000



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
												Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Sukabumi	50 Laporan	1.028.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		54 Laporan	1.100.000.000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sukabumi	150 Laporan	1.187.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		202 Laporan	1.600.000.000
6	1	3			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)		3 Level	1.258.610.000			3 Level	1.650.000.000
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)		49%	519.360.000			49%	700.000.000
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Sukabumi	4 Rekomendasi	375.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Rekomendasi	500.000.000
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Sukabumi	2 Rekomendasi	144.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Rekomendasi	200.000.000
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)		49%	739.250.000			49%	950.000.000
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukabumi	20 perangkat daerah	202.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 perangkat daerah	250.000.000



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana	
							Tahun 2026						
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sukabumi	8 perangkat daerah	151.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 perangkat daerah	200.000.000
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sukabumi	8 Kegiatan	246.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Kegiatan	300.000.000
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sukabumi	8 perangkat daerah	140.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 perangkat daerah	200.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Rancangan Akhir Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas Inspektorat dalam pemenuhan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi serta seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sukabumi, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 sebagai berikut: “**Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin**”, dimana Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 yakni Religius, Maju dan Inovatif. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;
4. ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.***

Dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya berada pada **misi ke 4** yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel**, dimana pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan



dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. Dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

- 1) Tidak ada korupsi
- 2) Tidak ada pelanggaran hukum
- 3) Tata kelola keuangan yang baik
- 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
- 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada *overlap*
- 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
- 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
- 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah, dan
- 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
Tahun 2025

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Ket.
1					2	3	4
6	1	2			Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.605.500.000	
6	1	2	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.389.500.000	
6	1	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	468.600.000	
6	1	2	02.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	340.200.000	
6	1	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja	214.300.000	
6	1	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan	516.900.000	
6	1	2	02.01	5	Pengawasan Desa	432.800.000	



Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Ket.
1					2	3	4
6	1	2	02.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	159.000.000	
6	1	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	257.700.000	
6	1	2	02.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.216.000.000	
6	1	2	02.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1.028.250.000	
6	1	2	02.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.187.750.000	
6	1	3			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.258.610.000	
6	1	3	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	519.360.000	
6	1	3	02.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	375.360.000	
6	1	3	02.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	144.000.000	
6	1	3	02.02		Pendampingan dan Asistensi	739.250.000	
6	1	3	02.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	202.000.000	
6	1	3	02.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	151.000.000	
6	1	3	02.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	246.000.000	
6	1	3	02.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	140.250.000	

4.2. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel Berikut :



Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
6	1				Inspektorat Daerah				21.008.411.147		
6	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			15.144.301.147		
6	1	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		25 Dokumen	106.450.000		
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi	2 Dokumen	18.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	10.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukabumi	3 Laporan	21.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi	12 Laporan	24.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		8 Dokumen	8.181.961.147		
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukabumi	80 Orang/bulan	8.118.961.147	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sukabumi	2 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sukabumi	4 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sukabumi	3 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sukabumi	1 Laporan	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sukabumi	2 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Sukabumi	12 Laporan	21.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		14 Dokumen	42.000.000		
6	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	14.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi	12 Laporan	21.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi	4 Laporan	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian untuk menunjang ASN		30 Dokumen	1.328.000.000		
6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sukabumi	1 Paket	198.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi	12 Dokumen	28.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sukabumi	50 Orang	960.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi	50 Orang	42.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi	90 Orang	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi		30 Dokumen	864.150.000		
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Paket	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	2 Paket	118.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Paket	41.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	4 Paket	152.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sukabumi	4 Paket	157.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	3.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Paket	4.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sukabumi	2 Laporan	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukabumi	12 Laporan	280.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sukabumi	4 Dokumen	3.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sukabumi	1 Dokumen	3.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dibeli		40 Unit	705.000.000		
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Unit	350.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Unit	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sukabumi	20 Unit	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sukabumi	30 Unit	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
6	1	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Sukabumi	1 Unit	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang kebutuhan perkantoran yang dipenuhi		40 Laporan	909.740.000		
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sukabumi	12 Laporan	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sukabumi	12 Laporan	231.040.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	12 Laporan	3.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi	12 Laporan	605.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		300 Unit	3.007.000.000		
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sukabumi	7 Unit	560.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sukabumi	8 Unit	175.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Mebeulair	Kab. Sukabumi	30 Unit	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sukabumi	70 Unit	110.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sukabumi	2 Unit	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
6	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Sukabumi	1 Unit	22.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Sukabumi	1 Unit	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sukabumi	1 Unit	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sukabumi	1 Unit	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	2			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,4 Poin	4.605.500.000		
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		59%	2.389.500.000		
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sukabumi	10 Laporan	468.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sukabumi	338 Laporan	340.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sukabumi	84 Laporan	214.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sukabumi	413 Laporan	516.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Sukabumi	60 Laporan	432.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang	Kab. Sukabumi	2 Kesepakatan	159.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	



Rancangan Akhir Rencana Kerja
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Sukabumi	6 Dokumen	257.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		59%	2.216.000.000		
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Sukabumi	50 Laporan	1.028.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sukabumi	150 Laporan	1.187.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	3			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)		3 Level	1.258.610.000		
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)		49%	519.360.000		
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Sukabumi	4 Rekomendasi	375.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Sukabumi	2 Rekomendasi	144.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Dukungan Terhadap Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)		49%	739.250.000		
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukabumi	20 perangkat daerah	202.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sukabumi	8 perangkat daerah	151.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sukabumi	8 Kegiatan	246.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sukabumi	8 perangkat daerah	140.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Inspektorat Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Sukabumi di dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian pada Renja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang digunakan pada tahapan perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Renja Inspektorat ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

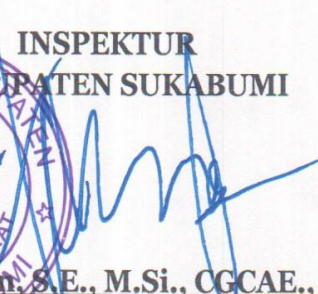


1. Renja Inspektorat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sukabumi.
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Renja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2025.

**INSPEKTUR
KABUPATEN SUKABUMI**

H. Komarudin, S.E., M.Si., CGCAE., CGRE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196801031996031004